

**PERAN DAN UPAYA KOMISI PEMILIHAN UMUM UNTUK
MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DEMI
TERWUJUDYA PEMERINTAHAN DAERAH YANG DEMOKRATIS
(Study di Kota Batu Pemilu Tahun 2019)**

Yayang Novika Sari¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : yayangnovika52@gmail.com

ABSTRACK

The choice of the theme is background by many people who are passive and do not care about the importance of holding general elections so that the role as well as the KPU's efforts are urgently needed to conduct socialization. Based on this background, this paper raises the following problem formulation: 1. How is the participation of Batu City community 2019 elections? 2. What are KPU's efforts to realize public political participation in the 2019 elections? 3. What are the obstacles of the KPU to increase the political participation of the people of Batu City? 4. What is the solution if there are obstacles in the process of increasing political participation in the people of Batu City? The method used by the writer is sociological juridical. data sources used are primary and secondary data sources. Data collection techniques carried out through interviews. This type of research is a type of descriptive research and data processing techniques carried out descriptively qualitative. Batu City community participation increases every year, it is the result of the efforts of the Batu City KPU.

Key words: *General Election Commission, Political Participation, Regional Government, Democratic*

ABSTRAK

Pemilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh banyak masyarakat yang pasif dan tidak peduli akan penting melakukan pemilihan umum sehingga peran sekaligus upaya KPU sangat dibutuhkan untuk melakukan sosialisasi Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana partisipasi masyarakat Kota Batu dalam pemilu tahun 2019 ? 2. Bagaimana upaya-upaya KPU untuk mewujudkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu 2019? 3. Apa saja kendala-kendala KPU untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kota Batu? 4. Bagaimana solusi jika terjadi kendala pada proses peningkatan partisipasi politik pada masyarakat Kota Batu? Metode yang digunakan oleh penulis adalah yuridis sosiologis. sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpuln data dilakukan melalui wawancara. Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Partisipasi masyarakat Kota Batu meningkat setiap tahunnya, hal tersebut merupakan hasil dari upaya KPU Kota Batu.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Kata Kunci : Komisi Pemilihan Umum, Partisipasi Politik, Pemerintahan Daerah, Demokratis

PENDAHULUAN

Pada Negara-negara demokrasi dikenal dua macam sistem pemerintahan presidensial (*fixed executive*) dan sistem pemerintahan parlementer (*parlemen executive*). Didalam pemerintahan presidensial terdapat pemisah tegas antara kekuasaan *legislatif* (parlemen) dengan kekuasaan eksekutif (pemerintah). Sedangkan dalam pemerintahan parlementer terdapat dua lembaga tinggi Negara yang saling mempengaruhi, yakni eksekutif dan legislatif. Bentuk pemerintahan di Indonesia memiliki 5 unsur yaitu, pemerintah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara, rakyat atau warga Negara yang merupakan satu bangsa, memiliki wilayah tertentu, berdaulat penuh serta mendapatkan pengakuan dari Negara-negara Internasional.² Dalam suatu pemerintahan suatu Negara untuk menggambarkan bahwa Negara tersebut demokrasi memberlakukan sistem Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh KPU.

Komisi Pemilihan Umum atau yang sering dikenal dengan (KPU) merupakan barisan paling terdepan dalam sebuah Negara, apalagi untuk menggambarkan wujud dari suatu negara yang demokratis yaitu dengan adanya penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini tidak hanya berurusan dengan partai politik dan peserta pemilu tetapi, mereka juga terjun langsung ke masyarakat luas di berbagai wilayah. Karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) berusaha melayani dan memenuhi semua kepentingan partai politik, pemerintah dan masyarakat luas, sementara disisi lainnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus benar-benar konsisten menerapkan semua ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang yang berlaku dan dibatasi atas kepentingan para pihak tersebut.

Komisi Pemilihan Umum mempunyai peran yang sangat penting untuk menjalankan suatu penyelenggaraan pemilu, KPU dituntut penuh agar konsisten untuk menjalankan tugas dan wewenangnya yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor

² Umar Said Sugiarto, S.H., M.S.,2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: penerbit Sinar Grafika, h. 253-255.

15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Dalam terselenggaranya pemilu KPU harus menunjukkan kualitas dan menunjukkan kehadiran sebagai sarana kedaulatan rakyat dalam mewujudkan sebagai pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, untuk menjadikan suatu Negara menjadi Negara yang demokratis, pemilu yang dilaksanakan oleh KPU akan meningkatkan dan menjamin kualitas pelaksanaan hak politik pada masyarakat yang benar-benar profesional yang mempunyai integritas, kapabilitas, serta akuntabilitas yang sangat tinggi untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis.

Masyarakat harus mengetahuinya akan pentingnya pemilu serta harus mengetahui betapa pentingnya suara mereka untuk daerah maupun untuk suatu Negara.. Dengan itu KPU Kota Batu dalam menghadapi pemilihan serentak harus melakukan upaya untuk peningkatkan partisipasi masyarakat daerah tersebut harus mengadakan sosialisasi keliling untuk menginformasikan kepada masyarakat bagaimana pentingnya pemilu tersebut. Dengan adanya sosialisasi DPT tersebut merupakan terobosan KPU Kota Batu untuk upaya memaksimalkan partisipasi Pemilu dalam Pilkada Kota Batu.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah disebutkan diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut : Bagaimana partisipasi masyarakat Kota Batu dalam pemilu tahun 2019 ? Bagaimana upaya-upaya KPU untuk mewujudkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu 2019? Apa saja kendala-kendala KPU untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kota Batu? Bagaimana solusi jika terjadi kendala pada proses peningkatan partisipasi politik pada masyarakat Kota Batu?

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui serta dapat menganalisa partisipasi masyarakat Kota Batu dalam pemilu Tahun 2019, upaya KPU mewujudkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu Tahun 2019, kendala KPU meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kota Batu, solusi jika terjadi kendala pada proses peningkatan partisipasi politik masyarakat Kota Batu. Manfaat yang diberikan dari penelitian tersebut memberikan manfaat bagi penulis, untuk menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilakukan sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Metode yang digunakan oleh penulis adalah yuridis

sosiologis. sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder Penelitian merupakan kegiatan yang ilmiah berdasarkan suatu metode tertentu yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum dengan cara menganalisis terhadap fakta hukum kemudian memecahkan atas suatu masalah tersebut yang telah timbul dalam gejala yang bersangkutan.³ Teknik pengumpuln data dilakukan melalui wawancara. Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Dinamika politik tingkat kian hari kian dinamis, politik local terus meningkatkan dari waktu ke waktu, meningkatnya politik tingkat lokal tidak lepas dari daya tarik politik khususnya pada saat pemilihan kepala daerah. Hadirnya anggapan diatas tidak lepas dari proses kelembagaan politik tingkat nasioanal,⁴ serta upaya dan peran KPU untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Partisipasi Masyarakat Politik Kota Batu Pemilu 2019

a. Pemilu Tahun 2014

| No | Wilayah/ Kecamatan | DPT | Jumlah Pemilih/Pemili h Tambahan | Jumlah Pengguna Hak Pilih | Prosentase |
|--|-----------------------|---------|--|------------------------------|------------|
| 1. | Batu | 67.992 | 69.205 | 55.304 | 81,33% |
| 2. | Bumiaji | 43.392 | 43.642 | 37.054 | 84,9% |
| 3. | Junrejo | 35.701 | 36.426 | 29.626 | 81,33% |
| Jumlah | | 147.085 | 149.273 | 121.984 | - |
| Prosentase Partisipasi Masyarakat Tahun 2014 | | | | 82,93% | |

Sumber: Data KPU Kota Batu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

b. Pemilu Tahun 2019

| NO | Wilayah | DPT | Jumlah Pemilih | Jumlah Pengguna Hak Pilih | Prosentase |
|----|---------|--------|----------------|---------------------------------|------------|
| 1. | Batu | 71.041 | 71.047 | 63.688 | 89,65% |

³ Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: penerbit Universitas Indonesia, h. 51.

⁴ Ahmad Siboy, S.H., M.H, *Kewenangan Mengadili Perselisihan Pemilukada*, Journal Ilmu Hukum, Vol I, No. 30 November 2015

| | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|-------|
| 2. | Bumiaji | 45.838 | 45.838 | 41.952 | 91,6% |
| 3. | Junrejo | 37.947 | 37.947 | 34.794 | 91,7% |
| Jumlah | | 154.826 | 154.832 | 140.434 | - |
| Prosentase Partisipasi Masyarakat Tahun 2019 | | | | 90,70% | |

Sumber: Data KPU Kota Batu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

*Keterangan : Rumus Prosentase Tingkat Partisipasi Masyarakat

Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih /Jumlah Pemilih X 100

Dari paparan diatas pada Pemilu Tahun 2014 jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dengan jumlah 149.273 pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden sedangkan pemilihan DPD, DPRD dan DPR menurun dengan jumlah 149.216 menurun dengan jumlah 57 masyarakat yang tidak ikut memberikan suaranya dengan presentase sekitar 5% saja.

Sedangkan pada Tahun 2019 dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dengan jumlah 154.832 pemilihan calon presiden dan wakil presiden masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak kurang dari 4.770, sedangkan pemilihan DPR RI kurang dari 4.952 yang presentasenya hanya 10% yang tidak menggunakan hak pilihnya sedangkan pemilihan DPD RI masih sama dengan jumlah diatas yang kurang dari 4.900 masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya atau berkisar dengan 10%.⁵

Berdasarkan hasil penelitian di KPU Kota Batu, bahwa partisipasi masyarakat Kota Batu meningkat setiap tahunnya, hal ini sesuai dengan keterangan narasumber Erfanudin, SH, MH selaku Komisioner KPU Kota Batu yang menyatakan bahwa “Partisipasi di Kota Batu setiap tahunnya *Allhamdulillah* selalu meningkat dengan adanya sosialisasi yang di bantu oleh relawan demokrasi, contohnya pada pemilihan pilwali tahun 2019 ini partisipasi masyarakat Kota Batu sudah mencapai target dan sudah melebihi target tingkat nasional”.⁶

⁶ Hasil wawancara dengan Erfanudin, SH, MH, Pada Hari Selasa, Tanggal 16 Desember 2019, Pukul 15.00 WIB

Menurut keterangan narasumber yang dikemukakan oleh Erfanudin, SH, MH selaku Komisioner KPU Kota Batu partisipasi masyarakat di Kota Batu sudah signifikan karena setiap pemilu ada tantangan tersendiri.⁷ Wujud dari pemerintahan daerah yang demokratis berasal dari masyarakat, karena mereka yang memiliki hak untuk menentukan pemimpin yang lebih baik dari sebelumnya dengan cara ikut andil dalam pelaksanaan pemilu. Sedangkan untuk mewujudkannya pemerintahan daerah yang demokratis juga harus ada timbal balik antara pemerintah yang sudah terpilih kepada masyarakat yang sudah memilihnya dengan cara menambahkan anggaran desa misalnya menambah dana desa dan alokasi dana desa untuk masyarakat.

Upaya KPU untuk Mewujudkan Partisipasi Politik Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian di KPU Kota Batu, bahwa untuk mewujudkan partisipasi politik masyarakatnya memiliki beberapa cara salah satunya adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi kepada masyarakat dan kepada pemilih pemula
2. Menyebar Brosur-brosur
3. Sosialisasi mobil keliling
4. Menggunakan Pamflet yang dipasang di tempat yang strategis
5. Bantuan Relawan Demokrasi untuk menjangkau masyarakat luas
6. Melakukan simulasi pemilu
7. Menggunakan alat peraga untuk masyarakat penyandang disabilitas
8. Mendirikan rumah pintar pemilu.⁸

Sesuai dengan keterangan narasumber Erfanudin, SH, MH selaku Komisioner KPU Kota Batu yang menyatakan bahwa “Kalau dari sosialisasinya sendiri kita tidak berdiri sendiri tetapi kita di bantu oleh relawan demokrasi dan tidak ada indikator bahwa ini hasil kinerja KPU sendiri. KPU hanya menjalankan tupoksi sesuai dengan regulasi selebihnya kita senengi dengan aparat desa, aparat kota, partai politik dan

⁷ Hasil *wawancara* dengan Erfanudin, SH, MH, Pada Hari Selasa, Tanggal 16 Desember 2019, Pukul 15.15 WIB

⁸ Hasil *wawancara* dengan Erfanudin, SH, MH, Pada Hari Selasa, Tanggal 16 Desember 2019, Pukul 15.15 WIB

lainnya”.⁹ Sosialisasi pemilu untuk pemilih pemula akan membentuk dan mengembangkan kompetensi kewarganegaraan, tujuan sosialisasi untuk pemilih pemula tidak hanya tahu tentang memilih tetapi juga mengajarkan dan membangun rasa kesadaran dan daya kritis terhadap setiap proses pemilu. Selanjutnya KPU Kota Batu juga menyebar brosur-brosur kepada masyarakat dengan maksud agar mereka membaca dan mengetahui bagaimana cara memilih dan menentukan pemimpin mereka dengan baik serta melakukan sosialisasi dengan menggunakan mobil keliling. Upaya lainnya untuk peningkatan partisipasi masyarakat penyandang disabilitas menggunakan pengertian rasa dengan cara berdialog menggunakan bahasa isyarat agar tetap dipahami oleh masyarakat penyandang disabilitas.

Kendala-kendala KPU untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Kota Batu

Berdasarkan hasil penelitian di KPU Kota Batu, bahwa ada beberapa kendala pada saat peningkatan partisipasi politik masyarakat kota batu yaitu sebagai berikut :

1. Kurangnya anggaran dana finansial
2. Kurangnya respon dari masyarakat
3. Masyarakat Kota Batu juga sangat masih pasif dan acuh
4. Kurangnya alat peraga untuk masyarakat penyandang disabilitas
5. Kurangnya tenaga relawan demokrasi untuk sosialisasi.¹⁰

Penyelenggara pemilu atau yang sering disebut PPK dan PPS tidak memiliki anggaran untuk melakukan sosialisasi. Sehingga hal ini yang seharusnya membantu KPU menjadi terkendala. Karena anggaran tersebut menjadi anggaran operasional untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Selanjutnya yang menjadi kendala diluar konteks anggaran mencari momentum untuk mengumpulkan masa atau mengumpulkan masyarakat agar tingkat kepeduliannya untuk memilih di pemilu meningkat. Tetapi pada KPU Kota Batu masih belum bisa memaksimalkan untuk hal itu. Kendala-kendala lainnya sebagai berikut :¹¹

⁹ Hasil *wawancara* dengan Erfanudin, SH, MH, Pada Hari Selasa, Tanggal 16 Desember 2019, Pukul 15.20 WIB

¹⁰ Hasil *wawancara* dengan Erfanudin, SH, MH, (Pada Hari Selasa, Tanggal 16 Desember 2019, Pukul 15.35 WIB)

¹¹ Hasil *wawancara* dengan Erfanudin, SH, MH, Pada Hari Selasa, Tanggal 16 Desember 2019, Pukul 15.30 WIB

1. Kurangnya adanya dukungan finansial untuk sosialisasi, KPU Kota Batu karena dalam tahapan ini anggaran yang disediakan oleh pemerintah masih belum juga simbang, dari kendala-kendala ini sangat penting bagi KPU dan pemerintah untuk memperhatikan mengenai kesiapan anggaran yang telah dibutuhkan guna untuk sosialisasi dan kesiapan finansial dalam hal sosialisasi kepada masyarakat.
2. Kurangnya respon dari masyarakat, tahapan ini menjadi sangat berat karena KPU Kota Batu terjun langsung kepada masyarakat serta harus memberikan pengertian serta memberi gambaran kepada masyarakat Kota Batu agar tersadar akan pentingnya pemilihan umum.
3. Masyarakat Kota Batu juga sangat masih pasif dan acuh akan pentingnya berpartisipasi untuk pemilu. Sedangkan KPU itu sendiri sangat kesulitan untuk menyentuh masyarakat yang paling bawah.
4. Masyarakat Kota Batu sangat sulit ditemui apalagi di bagian perkotaan karena mayoritas masyarakatnya bekerja di kantor dan sangat sulit untuk meluangkan waktunya untuk sekedar mendengarkan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU.
5. Anggaannya masih kurang maksimal karena hal tersebut yang menjadi kendala utama untuk melakukan sosialisasi.
6. Untuk melakukan sosialisasi masyarakat Kota Batu kendalanya ada pada orang tua yang sangat sulit mengerti akan bahasa yang digunakan pada saat sosialisasi (Desa Bumiaji).

Solusi KPU Jika Terjadi Kendala Pada Proses Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian di KPU Kota Batu, solusi jika terjadi kendala pada saat proses peningkatan partisipasi politik masyarakat sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi
 2. Bekerja sama dengan semua *stakeholder*
 3. Lebih memaksimalkan lagi untuk sosialisasi
 4. Penambahan relawan demokrasi
-

5. Lebih memkasimalkan lagi peningkatan penidikan politik masyarakat¹²

KPU Kota Batu jika terjadi kendala pada saat proses peningkatan partisipasi politik masyarakat solusinya seringkali melakukan evaluasi , pada saat evaluasi semua anggota KPU menyampaikan kekurangan yang telah dilakukan. Selanjutnya solusi jika terjadi kendala pada saat proses peningkatan partisipasi politik masyarakat yaitu, KPU Kota Batu lebih memaksimal lagi sosialisasi kepada masyarakat. Jadi solusinya KPU Kota Batu harus bekerjasama dengan semua stakeholder yaitu suatu masyarakat, atau kelompok dan komunitas ataupun individu yang memiliki hubungan suatu organisasi atau perusahaan, dan para calon legislative seharusnya juga melakukan sosialisasi agar lebih meningkatkan partisipasi masyarakat, dan masyarakat itu paham dan mengerti calon legislative yang mencalonkan dirinya. KPU Kota Batu juga membagi alat peraga , atau memfasilitasi misalnya, baleho, baner dengan ukuran yang cukup besar. Selain itu KPU Kota Batu juga memaksimalkan lagi peningkatan pendidikan masyarakat, memperkenalkan calon pemimpin yang dapat mereka pilih agar dapat merubah kehidupan kedepannya, serta membangun kepercayaan masyarakat akan dunia politik dengan menunjukkan kinerja pemerintahan yang baik,jujur dan adil, serta membuat kebijakan politis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Pemilu di Kota Batu setiap tahunnya meningkat KPU Kota Batu setiap tahunnya, Mewujudkan suatu wilayah yang demokratis merupakan cita-cita besar KPU Kota Batu. Wujud dari proses demokrasi dapat dilihat dari proses pemilu, berhasil atau tidaknya proses pemilihan umum dapat dilihat dari banyak atau tidaknya suara masyarakat. Hal ini yang akan menentukan nasib kedepannya suatu wilayah tersebut.
2. Upaya KPU Kota Batu untuk mewujudkan partisipasi politik masyarakatnya memiliki beberapa cara diantaranya adalah melakukan sosialisasi kepada

¹² Hasil *wawancara* dengan Ariansyah Mustafa, S.IP, Pada Hari Selasa, Tanggal 10 Desember 2019, Pukul 11.25 WIB

masyarakat biasa, pemilih pemula, penyandang disabilitas, menyebar brosur, memberikan pamflet dan diletakkan di tempat yang strategis.

3. Kendalanya pada saat peningkatan partisipasi adalah kurangnya dukungan finansial untuk melakukan sosialisasi serta kurangnya relawan demokrasi untuk melakukan sosialisasi.
4. Solusi yang dilakukan KPU guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat yaitu meningkatkan pendidikan politik untuk masyarakat terutama untuk pemilih pemula serta melakukan evaluasi untuk menyelesaikan suatu masalah yang timbul pada saat sosialisasi

Saran

1. Tetap menjaga eksistensi untuk mewujudkan suatu pemerintahan daerah yang demokratis serta dapat meningkatkan lagi partisipasi masyarakat Kota Batu.
2. lebih meningkatkan sosialisasi kepada pemilih pemula agar ikut serta berpartisipasi dalam pemilihan umum, apabila pemilih pemula ikut serta dalam pemilu akan memberikan presentase pemilih yang akan lebih tinggi dari sebelumnya
3. KPU Kota Batu harus lebih meningkatkan sosialisasi serta lebih meminimlalisir anggaran untuk kegiatan sosialisasi agar anggaran terserap secara penuh dan cukup.
4. DIPA harus lebih meningkatkan anggaran dana disetiap sosialisasi agar KPU Kota Batu dapat melakukan sosialisasi dengan baik, meningkatkan pendidikan politik masyarakat terutama untuk pemilih pemula, menambahkan tenaga ahli atau relawan demokrasi untuk ikut serta membantu dalam proses sosialisasi untuk menjangkau masyarakat luas.

Daftar Pustaka

Undang undang

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Buku

Soerjono Soekanto. 1986, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta; Universitas Indonesia.

Umar Said Sugiarto, S.H., M.S.,2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: penerbit Sinar Grafika.

Jurnal

Ahmad Siboy, S.H., M.H, *Kewenangan Mengadili Perselisihan Pemilukada*, Journal Ilmu Hukum, Vol I, No. 30 November 2015.